



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903-37-2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-927-2025
TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian usulan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan kembali perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 903-927-2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-10-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-927-2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
14. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.15/017/Sekt-Bapenda-2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal perubahan sebagian usulan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

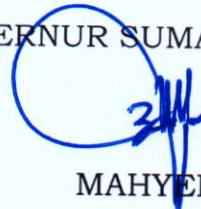
Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-927-2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-10-2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-927-2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 JANUARI 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Direktur PT. Bank Nagari di Padang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 909-37-2026
 TANGGAL : 19 Januari 2026
 TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-927-2025 TENTANG
 PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2026

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	4			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	H. AL AMIN, S.Sos. MM NIP. 19690629 199703 1 004	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SUMBAR				
2.	BETTY VETRIA, SE. M.Si NIP. 19720215 199803 2 003	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU PADA SEKRETARIAT		SEKRETARIS				
3.	DINI RAHMAYANTI, A.Md NIP. 19880115 201101 2 001	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT				
4.	DINA SUHARTINA, SE NIP. 19820915 201101 2 002	Penata Tk. I Gol. III/d	BENDAHARA PENERIMAAN		STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT				
5.	MERISTYA IZHAR, SM NIP. 19910918 201402 2 003	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT				
6.	A. SUHENDRI, S.Kom. M.Sc NIP. 19700722 199403 1 004	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH				

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2				6			9
7.	DEVI AULYA RAHMI, A.Md NIP. 19911221 202012 2 007	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH			
8.	ZUL AKMAL, S.IP. MM NIP. 19700701 199003 1 002	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG			
9.	FUAD ZAINUN, S.Sos NIP. 19751225 201001 1 007	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG			
10.	VALWINA WIDHIA, SE NIP. 19691223 199002 2 001	Penata Tk. I Gol. III/d	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG			
11.	RIANDA PUTRA, S.STP. M.Si NIP. 19891130 201010 1 001	Penata Tk. I Gol. III/d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN			
12.	MENA KUSARA NIP. 19841218 201001 2 001	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN			
13.	DONNY ARLAN, SE NIP. 19791215 201101 1 001	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN			
14.	WAWEN SATRIA, S.Sos. MM NIP. 19740326 199303 1 002	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		Pt. KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG			
15.	ANDRA OKTAVIANO NIP. 19800828 200801 1 003	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG			

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	JUNI OSRA, SH NIP. 19710616 200701 1 005	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG			
17.	ZAWIL MUZAKI, SE NIP. 19720529 199202 1 001	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI			
18.	DESI MARLINA, A.Md NIP. 19760710 201001 2 010	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI			
19.	STEPANUS MARYONO NIP. 19730225 200801 1 001	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI			
20.	RONALD BERNANDO, S.IP. MM NIP. 19881026 200701 1 001	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH			
21.	FATHURRIYAH WIESYAM, S.IP NIP. 19820624 200112 2 001	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELOJARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH			
22.	JANITRA LASENDHA YUDA, S.Kom NIP. 19840423 200901 1 002	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH			
23.	FEBRIANTO WISNU WARDANA, SE NIP. 19750209 200212 1 002	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG			

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	4			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24.	SYAFRIYENI, S.Ak NIP. 19851024 200904 2 007	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG			
25.	YONNEDI, SH NIP. 19720712 200701 1 009	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG			
26.	REFLIS, S.Sos. MM NIP. 19700115 199003 1 005	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU			KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING			
27.	FAIZAL HAMDI, SH NIP. 19790728 201001 1 007	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING			
28.	HENDRO, SE NIP. 19820604 201001 1 007	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING			
29.	DARYULISMAN, SH. M.I.Kom NIP. 19770711 201001 1 001	Penata Tk. I Gol. III/d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU			KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN			
30.	FITRIA JAYA ISASRI NIP. 19860709 201001 1 009	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN			
31.	GUSMARTALONA NIP. 19760318 200801 1 007	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN			

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD				JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS	7		8		
								3	
1	2					6			9
32.	ADRIAN FETRISKHA, SH. MPA NIP. 19860131 201101 1 001	Penata Tk. I Gol. III/d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU			KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK			
33.	FERRYA HAMID LOEDY, S.IP. M.AP NIP. 19790427 201101 1 002	Penata Tk. I Gol. III/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			KASI PENAGIHAN PENERIMAAN PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK			
34.	KAHARUDDIN NIP. 19690506 200701 1 047	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK			
35.	NASRIPUL ROMIKA, S.Sos NIP. 19681010 199308 1 002	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU			KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG			
36.	SYUKRIATI, ST NIP. 19850520 201502 2 002	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			KASI PENETAPAN PENERIMAAN UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG			
37.	RIO SATRIA, S.Kom. MM NIP. 19841207 201501 1 019	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			KASI PENAGIHAN PENERIMAAN UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG			
38.	DENI HIDAYAT, SE. MM NIP. 19770112 200212 1 004	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU			KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO			
39.	BENNY FERNANDA NIP. 19820328 200312 1 006	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO			
40.	HELMI NOFRIANDI, A.Md NIP. 19841125 201001 1 018	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO			

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

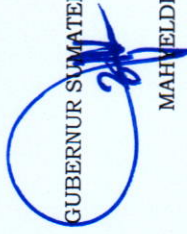
NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	FEBRY, SH NIP. 19690221 199202 1 001	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR			
42.	ZAMZAMI NIP. 19690928 200901 1 003	Pengatur Muda Tk. I Gol. II/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR			
43.	MUHAMMAD TAUFIK NIP. 19680916 201001 1 002	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR			
44.	JON EFRIZAL, S.Sos NIP. 19690118 198809 1 001	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG			
45.	NIATIL FAJRIANI, A.Md. Ak NIP. 19990705 202203 2 005	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG			
46.	OKTA NOLA SARI, A.Md NIP. 19841001 201101 2 011	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG			
47.	RITA HERLINDA, S.Sos NIP. 19700124 199403 2 009	Penata Tk. I Gol. III/d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		Pt. KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO			
48.	ADLAN YULIZAR, SH NIP. 19770716 200701 1 005	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO			

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	IRMA WAHYUNI, A.Md NIP. 19831123 200901 2 005	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		KASI PENETAPAN PENERIMAAN UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO			
50.	DEVI WAHYUNI, SH NIP. 19770612 201101 2 003	Penata Tk. I Gol. III/d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		Pt. KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK			
51.	DESI ERLINDA NIP. 19820201 200801 2 007	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK			
52.	DENNI MEILIZON, Nst NIP. 19830506 201001 1 006	Pengatur Tk. I Gol. II/d	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK			
53.	YANIDAR, S.Sos NIP. 19690110 199403 2 014	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK			
54.	KHADARISMAN NIP. 19810708 201212 1 005	Pengatur Gol. II/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK			
55.	ABRAL NIP. 19700414 199003 1 002	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK			
56.	ANDRI YUNIDAL, SE. MM NIP. 19700621 199310 1 001	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA			

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			PENDDK/ KURSUS	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57.	WILLA KURNIA EKA SYAFRITA, S.STP NIP. 19940104 201507 2 001	Penata Gol. III/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA			
58.	AIDIL MARTION, SE. MM NIP. 19691210 199503 1 002	Pembina Gol. IV/a	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			KASI PENETAPAN PENERIMAAN UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA			
59.	NANDA EDYA PUTRA, S.Si. M.CIO NIP. 19850616 201001 1 021	Pembina Gol. IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU			KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN			
60.	SISI SASMITA, S. Ak NIP. 19820701 201101 2 003	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN			
61.	NIRWAN NIP. 19720328 200801 1 002	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			STAF UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 MAHVELDI